

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manajemen aset daerah penting untuk mewujudkan sebuah laporan keuangan pemerintah daerah yang bermutu. Dalam sebuah laporan keuangan yang disajikan, sumber daya keuangan atau aset daerah dipercayakan oleh rakyat untuk dikelola pemerintah. Laporan keuangan harus memenuhi standar kualitas yang diinginkan dan ditetapkan, harus mempunyai petunjuk yang bisa diandalkan, antara lain : laporan keuangan yang disajikan bersifat jujur, bisa diverifikasi, dan juga netral.

Laporan keuangan harus mempunyai informasi-informasi yang mudah untuk dipahami. Laporan keuangan yang baik juga harus mempunyai informasi yang relevan, antara lain: mempunyai umpan balik, mempunyai informasi yang bisa digunakan untuk memprediksi periode berikutnya, tepat waktu dan lengkap. Laporan keuangan harus mempunyai informasi yang dapat dibandingkan.¹

Dalam penatausahaan ini termasuk didalamnya melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi barang milik daerah. Penatausahaan barang milik daerah dalam rangka mewujudkan tertib administrasi termasuk menyusun laporan barang milik daerah yang akan digunakan sebagai bahan penyusunan neraca. Sedangkan penatausahaan barang milik daerah dalam

¹ Anshari, Efrizal Sofyan, *Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang*, Jurnal Riset Manajemen Bisnis dan Public Vol 04 No 01 2016

rangka mendukung terwujudnya tertib pengelolaan barang milik daerah adalah menyediakan data agar pelaksanaan pengelolaan barang milik negara/daerah dapat sesuai dengan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.²

Aset tetap atau barang milik daerah adalah faktor yang penting dan tepat untuk pemerintah mengelola dan menyusun suatu laporan keuangan daerah. Dalam pengelolaannya aset tetap mempunyai fungsi penting dalam pelaksanaan pemerintahan, tetapi pada proses pengelolaan aset daerah bukan perkara yang mudah, pemerintah dalam mengelola aset daerah sering kali menghadapi berbagai kendala di dalam pengelolaannya. Hal ini terbukti dari opini yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) seperti pengecualian kewajaran atas nilai aset pemerintah daerah. Keadaan ini menjadi indikasi bahwa dalam proses pengelolaannya daerah mengalami hambatan dalam pengelolaan aset tetap, sehingga hasil pemeriksaan dari BPK menemukan adanya permasalahan dalam penatausahaan aset. Hal ini terjadi dikarenakan laporan keuangan pemerintahan daerah masih banyak yang belum menyajikan data secara lengkap berdasarkan dengan standar peraturan. Lemahnya penatausahaan aset daerah menyebabkan pemerintah daerah mendapatkan opini dari BPK Wajar Dengan Pengecualian (WDP) bahkan Tidak Memberi Pendapat (TMP).³

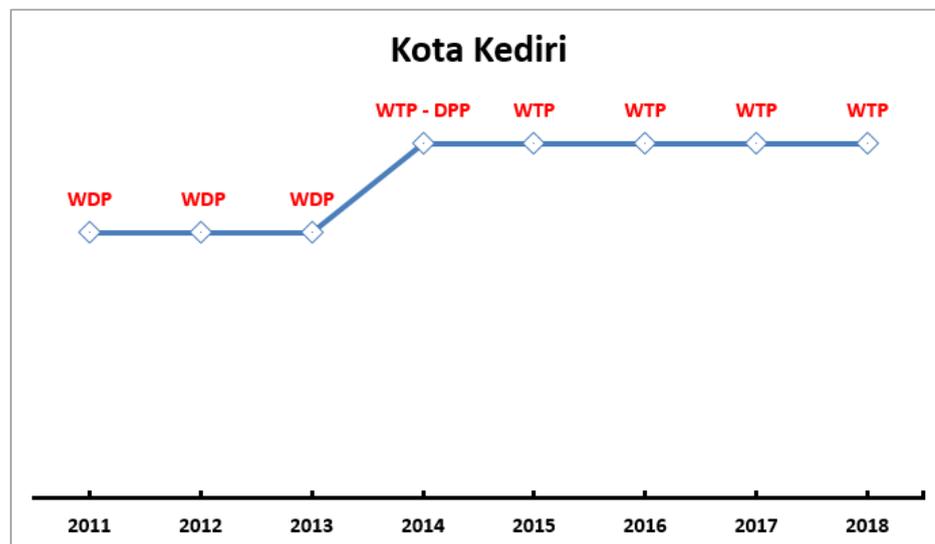
² Sukma, Febrianti. *Analisis Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya*. Jurnal Ekonomi Manajemen Vol. 10 No. 1, 2016

³ Anshari, Efrizal Sofyan, *Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang*, Jurnal Riset Manajemen Bisnis dan Public Vol 04 No 01 2017

Berdasarkan pemeriksaan BPK pada laporan keuangan pemerintah Kota Kediri dalam lima periode terakhir, Pemerintah Kota Kediri memperoleh opini yang belum memuaskan bagi semua pihak, seperti terlihat pada Tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1

**Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan
Pemerintah Kota Kediri dalam Lima Tahun Anggaran
2014 s.d 2018**



Sumber : BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur⁴

1. LKPD Tahun 2014 – Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan
2. LKPD Tahun 2015 – Wajar Tanpa Pengecualian
3. LKPD Tahun 2016 – Wajar Tanpa Pengecualian
4. LKPD Tahun 2017 – Wajar Tanpa Pengecualian
5. LKPD Tahun 2018 – Wajar Tanpa Pengecualian

Dari Tabel tersebut dapat dilihat bahwa laporan keuangan Pemerintah Kota Kediri mengalami peningkatan pada tahun 2015, dimana pada tahun sebelumnya atau pada tahun 2014 masih mendapat opini WTP-DPP (Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas). Terhitung mulai dari tahun 2015 hingga tahun 2018 Kota Kediri mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pada periode-periode sebelumnya kota Kediri memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), hasil ini didapatkan karena Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Kediri belum tertib.

Sistem pengendalian internal seperti struktur organisasi, metode, ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menstabilkan kekayaan sebuah organisasi, memastikan ketelitian dan kebenaran dari data akuntansi, memastikan keefisiensi dan mendukung dipatuhinya sebuah kebijakan dari manajemen.⁵ Sistem Pengendalian Internal merupakan sebuah aksi dan kegiatan yang dilakukan oleh kepala bagian di pemerintahan serta semua pegawai guna memberi sebuah keyakinan untuk tercapainya tujuan lembaga melalui kegiatan yang efektif serta efisien demi tercapainya laporan keuangan yang dapat dipertanggung jawabkan. Dalam sebuah organisasi perusahaan, baik profit maupun nonprofit pengendalian internal

⁴ BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur <https://surabaya.bpk.go.id> diakses pada 20 September 2019

⁵ Novtania Mokoginta,dkk, *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah*, Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, Vol 12 No 2 2017, Hlm 875

merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk kegiatan operasional serta kinerja dari sebuah organisasi membutuhkan suatu aturan yang di khususkan untuk memberikan batasan pada setiap kegiatannya.⁶

Atas dasar tersebut, beberapa poin yang menjadi fokus dan acuan dasar peneliti dalam tulisan ini, mencakup Pengaruh Penatausahaan Aset Daerah dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kediri.

B. Identifikasi Masalah

Penelitian Pengaruh Penatausahaan Aset Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kota Kediri, penentuan tema dan lokasi penelitian di dasarkan pada:

Peatausahaan Aset Daerah, dalam hal ini peneliti melihat tentang penatausahaan aset daerah di Kota Kediri, dengan penatausahaan aset ini dapat membantu menyusun laporan keuangan pemerintah yang berkualitas yang merupakan perwujudan dari transparansi dan akuntabilitas suatu entitas dan sebagai sarana informasi akuntansi agar dapat menyalurkan kinerja pengelolaan keuangan terhadap pihak lainnya.

Sistem Pengendalian Internal, dalam hal ini peneliti akan melihat apakah sistem pengendalian internal di Kota Kediri sudah efektif dan efisien serta dapat memberikan rasa percaya kepada masyarakat yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi.

Laporan Keuangan Daerah, dalam hal ini peneliti akan melihat

⁶ Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal

berapa besar pengaruh pengelolaan aset daerah dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas sebuah laporan keuangan Kota Kediri. Laporan keuangan sendiri adalah media yang digunakan guna mengetahui pencapaian kerja dan pelaksanaan fungsi pertanggungjawaban dalam suatu organisasi maupun pemerintahan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian sebagaimana diuraikan diatas, maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Apakah penatausahaan aset daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Kediri ?
2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan kota Kediri. ?
3. Apakah penatausahaan aset daerah dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan kota Kediri ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji seberapa besar pengaruh penatausahaan aset daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Kediri
2. Untuk menguji seberapa besar pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan kota Kediri.
3. Untuk menguji pengaruh penatausahaan aset daerah dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan Kota

Kediri.

E. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini, peneliti mengharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Memberikan pengetahuan tambahan tentang perkembangan pemikiran terhadap akuntansi pemerintahan.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai bahan untuk pembelajaran awal dalam melakukan penelitian dan untuk menambah pemahaman terkait berapa besar pengaruh yang dihasilkan dari pengelolaan asset daerah dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas keuangan Kota Kediri.

b. Bagi Instansi Terkait

Hasil penelitian ini, diharapkan mampu memberikan manfaat yang berguna untuk kemajuan instansi terkait terutama mengenai pengelolaan asset daerah dan sistem pengendalian internal laporan keuangan, dan untuk bahan sumbangan pikiran dalam peningkatan kualitas laporan keuangan dan dapat digunakan sebagai pengevaluasian mutu pengelolaan keuangan agar semakin baik untuk kedepannya.

c. Bagi Peneliti Lain

Diharapkan hasil penelitian ini mampu menjadi referensi awal guna mengembangkan informasi yang sudah didapatkan oleh peneliti sebelumnya

F. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup pada penelitian ini berfokus kepada variabel independen atau bebas (X) dan Variabel dependen atau terikat (Y). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Penatausahaan Aset Daerah (X1) dan Sistem Pengendalian Internal (X2) dan variabel terikatnya adalah Kualitas laporan Keuangan (Y).

2. Keterbatasan Penelitian

Demi menghindari terlalu meluasnya permasalahan yang dibahas, maka peneliti membatasi masalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini berfokus pada pengaruh Penatausahaan Aset Daerah dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kediri.
- b. Objek dari penelitian ini terfokus pada ini Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Kediri.

G. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

Penjelasan definisi secara konseptual diperlukan untuk menjabarkan dan memperkecil adanya ketidak sesuaian dalam penafsiran istilah, maka

peneliti menjabarkan istilah yang penting dalam judul ini. Istilah yang berkaitan adalah sebagai berikut :

- a. Penatausahaan aset daerah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penatausahaan menghasilkan dokumen yang dihasilkan sebagai bukti untuk mencatat transaksi dalam proses akuntansi meliputi semua dokumen yakni semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, yang berada dalam penguasaan Kuasa Pengguna Barang/ Pengguna Barang dan berada dalam pengelolaan Pengelola Barang.⁷
- b. Sistem Pengendalian Internal merupakan suatu cara, proses, dan aturan yang dibuat oleh anggota dewan komisaris, pihak manajemen dan seluruh anggota lainnya guna memberikan jaminan yang sesuai atas tercapainya efisiensi dan efektifitas kinerja, kehandalan suatu laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku⁸.
- c. Laporan Keuangan daerah adalah sebuah ringkasan dari sebuah proses pencatatan, sebuah ringkasan transaksi dan merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyat atas pengolahan dana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya⁹

⁷ Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah www.bpkd.go.id diakses pada 18 November 2019

⁸ Mulyadi, 2013, *Sistem Akuntansi Edisi Ketiga Cetakan Keempat*, (Jakarta: Salemba Empat) hlm 164

2. Definisi Operasional

- a. Penatausahaan barang milik negara atau daerah meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Barang milik negara/daerah yang berada dibawah penugasan pengguna barang atau kuasa pengguna barang harus dibukukan melalui proses pencatatan dalam daftar barang kuasa pengguna oleh kuasa pengguna barang. Daftar barang pengguna oleh pengguna barang dan daftar barang milik negara atau daerah oleh pengelolaan barang.
- b. Sistem pengendalian Internal adalah sebuah tindakan untuk memberikan rasa percaya dan jaminan melalui tindakan yang menunjang tercapainya tujuan sebuah organisasi. Pengendalian internal dibutuhkan agar mudah dalam menentukan permasalahan-permasalahan yang mungkin akan timbul dalam proses pencapaian tujuan, sehingga pencapaian tujuan bisa kita ketahui dengan jelas.
- c. Laporan keuangan daerah merupakan sebuah laporan pertanggung jawaban pemerintah terhadap rakyatnya terkait dengan pengelolaan aset selama satu periode. laporan keuangan juga merupakan sebuah wujud dari transparansi dan akuntabilitas suatu entitas dan juga sebagai media informasi untuk menyampaikan hasil pengelolaan keuangan terhadap pihak ketiga.

⁹ Novtania Mokoginta, dkk, *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah*, Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, Vol 12 No 2 2017, Hlm 8

H. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang mengapa peneliti mengambil tema tersebut, dalam bab ini peneliti menjelaskan mengenai alasan beserta menjadi gambaran tentang tema yang diajukan dalam penelitian sebagai dasar acuan awal proses penelitian. Pada bab ini nantinya terdiri dari beberapa pemaparan seperti latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan penegasan istilah.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab II landasan teori menjelaskan tentang pemikiran dari ahli-ahli serta penelitian terdahulu yang berkesinambungan dengan tema dan judul yang akan diteliti. Pemikiran para ahli dan penelitian terdahulu dijadikan dasar untuk penelitian yang akan datang. Pada bab ini terdiri dari beberapa sub bab, terdiri dari : kerangka teori, penelitian terdahulu, kerangka konseptual dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III ini menjelaskan tentang metode apa yang akan digunakan dalam penelitian sebagai tolak ukur untuk mencapai hasil penelitian secara maksimal. Pada bab ini terdiri dari : pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling dan sampel penelitian, sumber data, variabel, skala pengukuran, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi tentang gambaran dan hasil penelitian objek yaitu di BPPKAD Kota Kediri. Pemaparan data dari penelitian yang disajikan dalam bentuk pernyataan dan hasil analisis data. Gambaran tersebut diperoleh dari jawaban responden atas hasil koesioner

BAB V PEMBAHASAN

Pada bab V membahas mengenai deskripsi tentang responden di BPPKAD Kota Kediri. Menjelaskan temuan – temuan penelitian terkait pengaruh yang timbul, dengan mencocokkan dengan teori – teori dan hasil penelitian, dan menjelaskan isi dari hasil pengaruh pengelolaan asset daerah dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Kediri.

BAB VI PENUTUP

Bab Ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dari pokok permasalahan dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya dan juga berisi saran- saran dari hasil analisis data yang dapat dijadikan acuan dan masukan berbagai pihak yang berkepentingan dan untuk kemajuan dalam penelitian yang akan selanjutnya.